



LUAR NEGERI

Demo Pro-Palestina di AS

Bendera Israel-Patung Netanyahu Dibakar

AS, MIMBAR - Ratusan pedemo pro-Palestina membakar bendera Amerika Serikat, bendera Israel, hingga patung Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kala berdemonstrasi di luar Union Station di Washington, DC, Rabu (24/7).

Demo itu digelar ketika Netanyahu berkunjung ke AS untuk menyampaikan pidato di hadapan Kongres, The Capitol, pada Rabu malam. CNN melaporkan para pedemo terlihat membawa berbagai

■ Bersambung ke Hal 11



PP

Muhammadiyah Didukung Terima Izin Tambang

Jakarta, MIMBAR - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla mendukung keputusan PP Muhammadiyah yang ingin menerima izin usaha tambang dari pemerintah. "Kami mengapresiasi langkah strategis Muhammadiyah dalam wacana Izin Usaha

■ Bersambung ke Hal 11

Menkominfo-MUI Sepakat Perangi Judi Online



Jakarta, MIMBAR - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan pertemuan dengan MUI sore ini. Keduanya membahas upaya pencegahan praktik judi online.

■ Bersambung ke Hal 11

Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pertemuan dengan Majelis Ulama Indonesia. Pertemuan untuk membahas upaya pemberantasan judi online. Pertemuan antara Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Ketua MUI Anwar Iskandar digelar kantor Kemenkominfo, Jakarta. Menkominfo Budi Arie Setiadi mengklaim jumlah deposit masyarakat pada situs judi online mengalami penurunan signifikan menjadi Rp34,49 Triliun atau sekitar 50 persen. (Foto Liputan6.com)

MA Perintahkan Pemerintah Perketat Aturan Pinjol

Jakarta, MIMBAR - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan oleh sejumlah warga terhadap pemerintah. MA memerintahkan pemerintah memperbaiki aturan terkait pinjaman online (pinjol).

Sebagai informasi, gugatan ini diajukan oleh Nining Elitos dkk. Tergugat dalam perkara ini ialah Presiden Indonesia sebagai tergugat

■ Bersambung ke Hal 11

Dugaan Gratifikasi Oli Palsu di Kemendag Dilapor ke KPK

Jakarta, MIMBAR - Ratusan massa yang mengatasnamakan Pengurus Besar Komunitas Aktivistis Muda Indonesia (PB KAMI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menginvestigasi Kementerian Perdagangan (Kemendag) karena gagal dalam pengawasan peredaran oli dan sparepart palsu.

Desakan itu disampaikan langsung Ketua Umum

PB KAMI, Sultoni dalam unjuk rasa yang digelar di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (25/7).

Selain menggelar demo, PB KAMI juga membuat laporan secara resmi ke KPK terkait dugaan penerimaan gratifikasi dimaksud.

"Hari ini kami aksi di KPK, memberikan

dukungan KPK untuk melakukan investigasi, dugaan adanya gratifikasi yang diterima oleh pejabat-pejabat di Kementerian Perdagangan yang diberikan oleh para mafia pembuat oli palsu dan sparepart palsu," kata Sultoni kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis sore (25/7).

"Jadi ini sudah saya laporkan dengan beberapa bukti yang kami berikan," imbuhnya.

Karena kata Sultoni, oli dan sparepart palsu menguntungkan oknum-oknum tertentu hingga mencapai ratusan miliar rupiah, serta merugikan masyarakat.

"Kami minta penegakan hukum ini harus ditegakkan seadil-adil. Karena, dan saya sangat yakin gratifikasi itu cukup besar," pungkas Sultoni. (rm/js)

Soal Bos Besar Judi Online RI Berinisial T

Presiden dan Kapolri Kaget

KEPALA BP2MI Benny Rhamdani mengaku sudah pernah melaporkan sosok inisial T yang diduga pengendali bisnis judi online di Indonesia kepada Presiden Joko Widodo hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Benny menyebut hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Negara. Ia bahkan menyebut presiden dan kapolri kaget usai diberitahu sosok inisial T yang berada di balik bisnis judi online di Indonesia.

"Boleh ditanya kepada Menko saat itu Pak Mahfud MD. Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu," ujar Benny dalam sambutannya pada Pengukuhan dan Pembekalan Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia



(KAWAN PMI) di Kota Medan, Selasa (23/7).

Benny menjelaskan, sosok berinisial T tersebut berhasil terungkap setelah pihaknya mengusut kasus penempatan ilegal ke negara Kamboja. Hasilnya, kata dia, WNI yang berada di Kamboja kerap dipekerjakan dalam praktik judi online.

Ia bahkan menyebut terjadi perubahan tren tingkat pendidikan korban penempatan ilegal ke Kamboja. Benny menyebut

mayoritas korban di Kamboja merupakan lulusan SMA, S-1, hingga S-2.

"Saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri, 'sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor dibalik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor dibalik scamming online'," jelasnya.

"Saya cukup menyebut inisial T aja paling depan, yang kedua enggak perlu saya sebut.

■ Bersambung ke Hal 11

BUMN Balai Pustaka PHK 65 Orang

Jakarta, MIMBAR - BUMN Balai Pustaka melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 65 karyawannya.

"Tepatnya 65 orang melalui mekanisme golden shake hand," kata Direktur Utama PT Balai Pustaka (Persero) Achmad Fachroddi, dikutip dari detikcom, Kamis (25/7).

Golden shake hand atau golden handshake adalah program pensiun dini. Para pekerja akan diminta perusahaan untuk keluar secara sukarela.

Achmad mengatakan, karyawan Balai Pustaka yang di-PHK dipastikan mendapatkan pesangon. Bahkan, ia

■ Bersambung ke Hal 11

Jadwal Salat

19 MUHARRAM 1446 H

Subuh : 05:03 WIB	Maghrib : 18:43 WIB
Zuhur : 12:35 WIB	Isya : 19:56 WIB
Ashar : 15:58 WIB	

■ Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayah

Bukan Pesimistis

Oleh Dr A Rasyid, MA

HARI ini umat muslim kondisinya persis seperti habis perang Uhud. Banyak di antara kita bersikap lemah, merasa pesimis untuk melawan musuh-musuh Allah di muka bumi ini. Karena merasa lebih baik menyelamatkan perut masing-masing. Itu artinya jika melihat dan mengetahui kejahatan lebih baik didiamkan, tidak usah diributkan, nanti akan membawa malapetaka.

Bahkan lebih tragisnya ada yang melihat kejahatan tidak lagi seperti kejahatan,

■ Bersambung ke Hal 11

■ Kaget Woiii...
■ Ckckck...

Menkominfo-MUI Sepakat...

Dari Halaman 1

Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, MUI mendukung penuh upaya Satgas pemberantasan judi online. Budi Arie menilai dukungan MUI ini positif untuk kerja satgas.

“Dukungan dari MUI ini membuat kita semua di pemerintahan, khususnya di satgas judi online untuk terus bekerja keras, menyelamatkan bangsa, menyelamatkan negara, dari dampak yang sangat buruk dari judi online,” kata Budi Arie dalam konferensi pers di kantor Kemenkominfo, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (25/7).

Sementara itu, Ketua MUI Anwar Iskandar menilai positif hadrimya satgas judi online. Dia

menegaskan MUI sepakat agar seluruh elemen menyatakan pegang terhadap fenomena judi online.

“Oleh karena itu, kami dari MUI menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, khususnya kepada presiden, yang sudah membentuk satgas yang nanti akan mengarah kepada larangan secara total judi online ini,” ujar Anwar.

“Saya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat di negara ini untuk bergandeng tangan, bersatu menyelamatkan bangsa ini dari judi online dan kita nyatakan perang terhadap judi online,” tegasnya.

2,6 JUTA SITUS

Lebih lanjut diutarakan Budi Arie, sejauh ini

pihaknya telah menutup 2,6 juta situs judi online.

“Hingga saat ini kami sudah melakukan banyak langkah, khususnya Kominfo, dengan menutup 2.625.000 lebih situs judi online,” kata Menkominfo Budi Arie Setiadi kepada wartawan di kantornya.

Budi Arie menjelaskan penutupan jutaan situs judi online ini dilakukan sejak Juli 2023 hingga Juli 2024. Dia mengungkap penutupan ini pun berhasil menekan perputaran uang masyarakat yang terlibat bermain judi online hingga Rp 45 triliun.

“Jadi mulai tutup tanggal 17 Juli 2023 hingga 23 Juli 2024, kami telah menutup hampir 2,6 juta situs judi online,” jelas Budi Arie.

“Apa yang kami lakukan ini mampu menahan

hingga 50 persen dari kemungkinan dampak judi online. Kalau dalam angka, kita mampu menyelamatkan atau menahan orang bermain judi hingga senilai 45 T,” sambungnya.

Budi Arie mengatakan, penutup terhadap situs judi online ini pun akan terus dilakukan secara masif. Menurutnya, penutupan ini menjadi salah satu upaya menghilangkan peredaran judi online di Indonesia.

“Apa yang kita lakukan sekarang ini dan kita berharap itu harus lebih. Supaya judi online ini bisa hilang dari muka bumi Indonesia. Kita akan melakukan langkah-langkah yang masif agar judi online ini bisa kita berantas dari bumi Indonesia,” pungkasnya. (det/js)

Bendera Israel...

Dari Halaman 1

ukuran bendera Palestina dan mengenang simbol-simbol Palestina, salah satunya kain kaffiyeh. Mereka juga membawa poster-poster yang menuntut dihentikannya agresi di Gaza. Setidaknya sembilan orang ditangkap aparat kepolisian DC imbas demo tersebut.

Menurut polisi, dua orang ditahan dan didakwa karena menyerang seorang petugas. Dua orang lainnya ditangkap karena melewati garis polisi usai serangan terhadap aparat terjadi.

Di lokasi lain di dekat Capitol, lima orang juga didakwa dengan tuduhan berkerumun, menghambat atau menghalangi jalan. Polisi mengatakan mereka menggunakan alat perunggu untuk menautkan lengan mereka dan menghalangi lalu lintas.

Gedung Putih telah bersuara mengenai demonstrasi ini. Gedung Putih menyelenggarakan demonstrasi yang membakar bendera tersebut dengan menyebut tindakan itu memalukan.

“Antisemitisme dan kekerasan tidak pernah bisa diterima,” kata juru bicara Gedung Putih Andrew Bates dalam sebuah pernyataan.

Netanyahu sedang berada di AS pekan ini untuk memberikan pidatonya di hadapan Kongres AS.

Selain berpidato, dia dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joe Biden pada Kamis (25/7), dan akan menemui Wakil Presiden Kamala Harris.

Netanyahu juga akan disambut oleh calon presiden AS dari Partai Republik, Donald Trump, di kediamannya pribadi resor Mar-a-Lago di Florida pada Jumat (26/7). (cnni/js)

BUMN Balai...

Dari Halaman 1

mengklaim ada pekerja yang mengantongi Rp500 juta.

Bos Balai Pustaka itu turut berterima kasih kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan jajarannya. Ia menyebut PHK ini dibantu melalui PT Danareksa (Persero).

“Danareksa itu menghimpun yang kecil-kecil bakal naik kelas jadi besar. Kemarin, untuk mengurangi karyawan (PHK) yang terkait percetakan, karena dikurangi itu dibantu Danareksa,” jelasnya.

Meski harus memberhentikan 65 orang kar-

yawan, Achmad yakin Balai Pustaka bakal terus eksis. Ia percaya dengan dukungan Menteri BUMN Erick.

Achmad menekankan Balai Pustaka bisa terus berkembang.

“Jadi oleh karena itu, saya tidak khawatir, Balai Pustaka akan terus melejit, akan terus naik. Jadi, di tangan Pak Erick Thohir, mudah-mudahan Balai Pustaka akan semakin menggelekat,” tandas Achmad.

Berdasarkan laman resmi perusahaan, Balai Pustaka resmi berdiri pada 22 September 1917. Dengan kata lain, perusahaan pelat merah ini sudah berumur sekitar 107 tahun. (det/js)



Hidayah

Bukan Pesimistis

Dari Halaman 1

tapi sebuah kebenaran yang memang harus diperjuangkan. Sebenarnya kita sudah terjebak dengan gaya hedonisme, suatu pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup.

Sesungguhnya Islam menawarkan tempat perlindungan spiritual bagi umat Islam guna menjalani kehidupan damai dengan menggunakan kekuatan batin dan memiliki hubungan kuat dengan kekuatan tertinggi, Allah, bersikap optimis, memurnikan perasaan, dan tidak menunggu kejadian luar biasa. Islam mengakui pentingnya status spiritual sebagai kekuatan batin yang dapat digunakan untuk memiliki pikiran yang tenang, kesadaran yang sehat, dan pikiran yang positif.

Sebuah ayat yang perlu kita renungkan hari ini adalah: Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman. (QS. Ali Imran 139)

Sebab turunnya QS. Ali Imran ayat 139 ini adalah untuk mengobati kesedihan kaum muslim yang sempat terpukul mundur dalam perang Uhud. Dengan kata lain, ayat ini merupakan sebuah motivasi bagi kaum muslim agar tidak pesimis dalam menghadapi persoalan kehidupan.

Esensi makna ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah Swt melarang kaum muslim untuk pesimis, bersedih dan berputus asa disebabkan kehilangan mereka karena terbunuh ataupun terluka di perang Uhud. Sebaliknya, Allah Swt ingin mengajarkan kepada kaum muslim untuk menjadikan kesedihan di perang Uhud tersebut sebagai cambuk agar lebih semangat berjuang dalam membela agama Allah Swt.

Islam sangat mementingkan kesabaran dan hal ini menjadi fokus sekitar 200 ayat Alquran dan disebutkan secara tidak langsung dalam banyak ayat lainnya. Kesabaran adalah kebajikan yang memungkinkan umat Islam untuk terus maju menuju tujuan yang mulia, tidak terpengaruh oleh keadaan yang merugikan atau provokasi yang berulang-ulang.

Dalam Islam sendiri sudah jelas bahwa tolong menolong dalam kebaikan merupakan sesuatu yang dianjurkan, sedangkan tolong menolong dalam keburukan, kejahatan dan kemaksiatan adalah hal yang dilarang dan diharamkan. Alquran sendiri menyimpulkan perbuatan tolong menolong kepada kemaksiatan dalam surah al-Maidah ayat 2: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (*)

PP Muhammadiyah..

Dari Halaman 1

kecenderungan akan menerima izin tambang dari pemerintah. Kecenderungan ini lanjutnya, terlihat ketika digelarnya rapat PP Muhammadiyah beberapa waktu lalu. Namun, ia mengatakan organisasi-sanya belum memutuskan sikap resmi soal izin tambang dari pemerintah.

“Saya hadir di rapatnya, setahu saya kok belum diputuskan, palu belum di ketok ‘diterima, tok tok’ gitu. Tapi ada kecenderungan setidaknya, kecenderungan menerima,” kata Dahlan, Kamis (25/7).

AKHIR PEKAN INI

Terpisah, PP Muhammadiyah buka suara terkait kabar sudah menyetujui untuk menerima izin pengelolaan tambang yang diberikan pemerintah. PP Muhammadiyah membenarkan saat ini sudah ada tawaran pengelolaan tambang yang disampaikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

“Ada penawaran oleh Pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BPKPM, Bahlil Lahadalia yang disampaikan dalam rapat Pleno PP Muhammadiyah 13 Juli 2024. Meskipun, belum disampaikan secara resmi lokasi tambang bagi Muhammadiyah,” kata Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti lewat akun Instagramnya, seperti dilihat, Kamis (25/7).

PP Muhammadiyah telah membahas penawaran tersebut dalam rapat pleno pada 13 Juli 2024. Selanjutnya, Muhammadiyah akan menyampaikan keputusan resmi mengenai pengelolaan

tambang tersebut pada akhir pekan ini.

“Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP Muhammadiyah akan disampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang insyaallah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Jogjakarta,” kata Mu’ti.

Dalam pernyataan sebelumnya, Muhammadiyah menyampaikan kemungkinan ormas untuk mengelola tambang merupakan kewenangan dari pemerintah. Namun Muhammadiyah menyadari ada syarat yang harus dipenuhi jika ormas keagamaan mengelola tambang tersebut.

Pada bulan lalu, Muhammadiyah menyampaikan belum ada pembicaraan terkait izin pengelolaan tambang tersebut kepada Muhammadiyah. Jika nantinya ada penawaran, Muhammadiyah akan membahasnya dengan saksama agar tidak menimbulkan masalah bagi organisasi dan masyarakat.

“Sampai sekarang tidak ada pembicaraan Pemerintah dengan Muhammadiyah terkait dengan kemungkinan pengelolaan tambang,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti saat dihubungi, Minggu (26/7).

“Kalau ada penawaran resmi pemerintah kepada Muhammadiyah akan dibahas dengan saksama. Muhammadiyah tidak akan tergesa-gesa dan mengukur kemampuan diri agar pengelolaan tambang tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara,” imbuhnya. (bes/js)

MA Perintahkan...

Dari Halaman 1

aplikasi peer-to-peer lending atau pinjaman online dapat beroperasi di Indonesia;

c. Memerintahkan Tergugat IV (Menkominfo) untuk membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman online;

d. Memerintahkan Tergugat IV (Menkominfo) untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam praktik pinjam-meminjam dalam aplikasi aplikasi peer-to-peer lending atau pinjaman online.

Majelis hakim juga menyatakan agar Presiden, Wapres, dan Ketua DPR untuk:

a. Melakukan supervisi terhadap Tergugat V (OJK) untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat;

b. Melakukan supervisi terhadap pembuatan regulasi mengikat yang mengatur:

1. Proses uji kelayakan pengajuan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebelum perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online menyepakati perjanjian pinjam-meminjam;

2. Batasan pengambilan akses data pribadi hanya pada kamera, microphone, dan location. Dalam hal terdapat akses di luar ketentuan tersebut, masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online dapat menolak akses tanpa mempengaruhi kelayakan pengajuan pinjaman;

3. Jaminan tidak adanya ketentuan baku dalam perjanjian elektronik;

4. Larangan tegas dan sanksi terhadap penyebaran data pribadi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online;

5. Batasan biaya administrasi pinjaman yang didasarkan pada nilai yang wajar dan adil;

6. Batasan bunga pinjaman sesuai dengan suku bunga yang dianjurkan (bunga moratour);

7. Larangan tegas dan sanksi penagihan pinjaman yang dilakukan dengan tindak pidana, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online

8. Mekanisme penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen;

9. Sanksi pencabutan izin usaha bagi perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan aplikasi pinjaman online, jika terjadi pelanggaran perlindungan konsumen, pelanggaran hak atas privasi, pelanggaran hak atas rasa aman dan tindak pidana dalam proses penagihan;

c. Melakukan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan hukum agar tidak lagi terjadi dalam penggunaan aplikasi pinjaman online oleh masyarakat;

Kemudian, majelis hakim menyatakan agar Menkominfo untuk:

a. Membuat peraturan yang menjamin penghormatan, perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi pinjaman online dan warga masyarakat sebagaimana

diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait;

b. Melakukan kerja sama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital untuk membuat regulasi yang memastikan izin pendaftaran sebagai syarat bagi aplikasi peer-to-peer lending atau pinjaman online dapat beroperasi di Indonesia;

c. Membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman online;

d. Melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam praktik pinjam-meminjam dalam aplikasi aplikasi peer-to-peer lending atau pinjaman online.

Lalu, majelis hakim menyatakan OJK untuk:

a. Membuat peraturan yang menjamin penghormatan dan perlindungan bagi pengguna aplikasi pinjaman online dan warga masyarakat sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait;

b. Membuat regulasi mengikat yang mengatur: 1. Proses uji kelayakan pengajuan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebelum perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online menyepakati perjanjian pinjam meminjam;

2. Batasan pengambilan akses data pribadi hanya pada kamera, microphone, dan location. Dalam hal terdapat akses di luar ketentuan tersebut, masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online dapat menolak akses tanpa mempengaruhi kelayakan pengajuan pinjaman;

3. Jaminan tidak adanya ketentuan baku dalam perjanjian elektronik;

4. Larangan tegas dan sanksi terhadap penyebaran data pribadi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online;

5. Batasan biaya administrasi pinjaman yang didasarkan pada nilai yang wajar dan adil;

6. Batasan bunga pinjaman sesuai dengan suku bunga yang dianjurkan (bunga moratour);

7. Larangan tegas dan sanksi penagihan pinjaman yang dilakukan dengan tindak pidana, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online;

8. Mekanisme penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen;

9. Sanksi pencabutan izin usaha bagi perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan aplikasi pinjaman online, jika terjadi pelanggaran perlindungan konsumen, pelanggaran hak atas privasi, pelanggaran hak atas rasa aman dan tindak pidana dalam proses penagihan;

10. Memastikan pelanggaran hukum tidak lagi terjadi dalam penggunaan aplikasi pinjaman online oleh warga masyarakat dengan menerapkan melakukan pengawasan menyeluruh dan menjatuhkan sanksi yang efektif terhadap perusahaan aplikasi pinjaman online yang melakukan pelanggaran hukum. (det/js)

Presiden dan...

“Mereka yang kita kategorikan sebagai penjahat. Penjual anak bangsa yang mengambil keuntungan dan pestapora dari bisnis haram perdagangan manusia,” imbuhnya.

TIDAK TAHU

Terpisah, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengaku tak tahu-menahu soal inisial T yang disebut sebagai bos besar judi online di Indonesia. “Kalau tanya inisial-inisial ya tanya yang buat inisial, bukan kita. Emang tebak-tebak buah manggis?” cetus dia, dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (25/7). “T itu kan banyak. Masa Mayor Teddy,” kelakarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkap pengendali judi online terbesar di Indonesia adalah sosok berinisial T.

Menurutnya, ia tidak pernah dan tidak akan

pemah tersentuh hukum.

Budi melanjutkan, pihaknya lebih berfokus pada bagaimana membuat sesedikit mungkin masyarakat main judi online.

“Kalau soal penegakan hukum itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum, tugas kami adalah bagaimana mencegah judi online itu menjadi permainan atau hal yang digunakan oleh masyarakat,” urai dia. “Saya tidak mau berspekulasi tentang nama-nama. Tugas kami mencegah jangan sampai ada masyarakat maen judi online,” imbuh dia.

Soal dorongan agar penegak hukum menangani bandar judi online dan tak cuma pemainnya, Budi Arie mengaku “kita sudah melakukan semuanya.”

“Soal cara, langkah-langkah aparat penegak hukum, silakan tanyakan ke aparat penegak hukum. Kadang enggak perlu dibocorkan dulu, mau nangkap si A masa dibilangin,” seloroh dia. (cnni/js)